



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT TINGKAT III CIREMAI

PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Pertahanan melalui Surat Nomor B/1632/IX/2019 tanggal 10 September 2019 hal Permohonan Pengesahan Tarif 5 Rumah Sakit PK BLU TNI AD, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT III CIREMAI PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan

- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif *visite* dan konsultasi pada *intensive care unit* (ICU) dan perinatologi;
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif penanganan jenazah dan *visum et repertum*;
- e. tarif tindakan medis non operatif;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan kendaraan;
- h. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- i. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- j. tarif bantuan kesehatan; dan
- k. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif bantuan kesehatan, dan tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf k ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen

dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban kecelakaan tanpa identitas;
 - b. korban terdampak kondisi kahar;
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin; dan/atau
 - d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1346

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP. 19730213-199703-1-001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

TINGKAT III CIREMAI PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT TINGKAT III CIREMAI PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	225.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 70.000,00
	3. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	30.000,00 s.d. 50.000,00
	4. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 80.000,00
	5. Asuhan Keperawatan	Per Hari	90.000,00 s.d. 130.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	840.000,00 s.d. 1.100.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 1.300.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	1.430.000,00 s.d. 1.760.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	2.070.000,00 s.d. 2.600.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Bedah Ortopedi		
a.	Kecil	Per Tindakan	840.000,00 s.d. 1.100.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	2.160.000,00 s.d. 2.640.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	2.970.000,00 s.d. 3.630.000,00
d.	Khusus	Per Tindakan	3.960.000,00 s.d. 4.840.000,00
3.	Bedah <i>Obgyn</i>		
a.	Kecil	Per Tindakan	1.350.000,00 s.d. 1.650.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	1.800.000,00 s.d. 2.200.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	2.250.000,00 s.d. 2.750.000,00
d.	Khusus	Per Tindakan	2.700.000,00 s.d. 3.300.000,00
4.	Bedah Mata		
a.	Kecil	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 950.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	970.000,00 s.d. 1.200.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	1.290.000,00 s.d. 1.600.000,00
d.	Khusus	Per Tindakan	1.940.000,00 s.d. 2.400.000,00
5.	Bedah Urologi		
a.	Kecil	Per Tindakan	3.450.000,00 s.d. 4.300.000,00
b.	Sedang	Per Tindakan	5.180.000,00 s.d. 6.400.000,00
c.	Besar	Per Tindakan	5.600.000,00 s.d. 6.870.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Khusus	Per Tindakan	7.430.000,00 s.d. 9.100.000,00
6.	Bedah Syaraf		
	a. Besar	Per Tindakan	5.940.000,00 s.d. 7.260.000,00
	b. Khusus	Per Tindakan	7.120.000,00 s.d. 8.750.000,00
7.	Bedah Mulut		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.340.000,00 s.d. 1.650.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.660.000,00 s.d. 2.100.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	2.290.000,00 s.d. 2.850.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	3.320.000,00 s.d. 4.100.000,00
8.	Bedah Telinga Hidung Tenggorokan		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.340.000,00 s.d. 1.650.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.660.000,00 s.d. 2.100.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	2.290.000,00 s.d. 2.850.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	3.320.000,00 s.d. 4.100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 181/PMK.05/2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
TINGKAT III CIREMAI PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT TINGKAT III CIREMAI PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>Visite dan Konsultasi pada Intensive Care Unit (ICU) dan Perinatologi</i>		
	1. <i>Visite dan Konsultasi Dokter</i>		
	a. <i>Visite Dokter Umum</i>	Per Kunjungan	50.000,00
	b. <i>Konsultasi Dokter Spesialis</i>	Per Kunjungan	100.000,00
	c. <i>Visite Dokter Spesialis</i>	Per Kunjungan	200.000,00
	2. <i>Asuhan Keperawatan</i>		
	a. <i>Asuhan Keperawatan Ruang Anak</i>	Per Hari	75.000,00
	b. <i>Asuhan Keperawatan</i>	Per Hari	200.000,00
	3. <i>Ruang Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Hari	800.000,00
B.	<i>Administrasi</i>		
	1. <i>Rawat Inap</i>	Per Kunjungan	15.000,00
	2. <i>Rawat Jalan</i>		
	a. <i>Pasien Baru</i>	Per Kunjungan	7.500,00
	b. <i>Pasien Lama</i>	Per Kunjungan	15.000,00
C.	<i>Rawat Jalan</i>		
	1. <i>Pemeriksaan/Konsultasi</i>	Per Pasien	5.000,00 s.d 175.000,00
	2. <i>Klinik Umum/Rawat Jalan</i>	Per Tindakan	7.500,00 s.d. 35.000,00
	3. <i>Klinik Mata</i>	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 875.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Klinik Bedah		
	a. Tindakan Non Operatif		
	1) Kecil	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 287.500,00
	2) Sedang	Per Tindakan	345.000,00 s.d. 520.000,00
	b. Tindakan Operatif	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 460.000,00
5.	Klinik Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 400.000,00
6.	Klinik Jantung	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 900.000,00
7.	Klinik Kandungan dan KIA/KB	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 350.000,00
8.	Klinik Gigi		
	a. Klinik Gigi Umum	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 250.000,00
	b. Perawatan Ortodonsia	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 5.500.000,00
	c. Konservasi Gigi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 350.000,00
	d. Endodontik	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 2.000.000,00
	e. Perawatan Prostodontik	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 3.000.000,00
9.	Klinik Psikologi	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 300.000,00
10.	Klinik Kesehatan Jiwa	Per Tindakan	130.000,00 s.d. 350.000,00
11.	Klinik Penyakit Paru	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 100.000,00
12.	<i>Medical Check Up</i>	Per Paket	785.000,00 s.d. 2.914.000,00
13.	Hemodialisa	Per Tindakan	900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Penanganan Jenazah dan <i>Visum et Repertum</i>		
	1. Penanganan Jenazah		
	a. Layanan Kamar Jenazah	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 200.000,00
	b. Persemayaman Jenazah	Per Paket	617.500,00 s.d. 812.500,00
	c. Penanganan Jenazah Non Muslim	Per Paket	390.000,00
	d. Pengawetan Jenazah	Per Tindakan	1.170.000,00
	2. <i>Visum Et Repertum (VER)</i> Luar Korban Hidup	Per Tindakan	150.000,00
E.	Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa		
	a. Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 105.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 40.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 155.000,00
	2. Ruang Bersalin		
	a. Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 75.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.500,00 s.d. 800.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	235.000,00 s.d. 350.000,00
	d. <i>Obsgyn</i>	Per Tindakan	980.000,00 s.d. 2.543.000,00
	3. Ruang Perinatologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	12.000,00 s.d. 40.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 180.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 400.000,00
4.	Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Kecil	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 70.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	12.000,00 s.d. 200.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 850.000,00
	d. Pemakaian Alat Kesehatan ICU	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 720.000,00
	e. Observasi Khusus Pasien <i>Post Operasi</i>	Per Pasien Selama 4 Jam	270.000,00
5.	Ruang Instalasi Gawat Darurat		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 105.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 120.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 400.000,00
6.	Rehabilitasi Medis	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 150.000,00
7.	Tindakan Lainnya		
	a. Transfusi Darah	Per Tindakan/ Kolf	450.000,00
	b. Pemasangan Oksigen	Per Tindakan/ Jam	7.500,00 s.d. 15.000,00
	c. Injeksi <i>Bolus</i>	Per Waktu Pemberian	10.000,00
	d. Observasi Khusus Rawat Inap	Per Tindakan/ Jam	12.000,00
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	16.500,00 s.d. 2.188.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Radiologi		
	a. Foto Non Kontras	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 360.000,00
	b. Foto dengan Kontras	Per Tindakan	85.000,00 s.d. 820.000,00
	c. Ultrasonografi (USG)	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 900.000,00
	d. <i>CT Scan</i>	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 2.250.000,00
3.	Pemeriksaan Histopatologi	Per Tindakan	110.000,00 s.d. 300.000,00
4.	<i>Central Sterile Supply Departement (CSSD)</i>	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 425.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001

